

RINTISAN MENUJU KEMANDIRIAN AIR MINUM MASYARAKAT DESA DI SULAWESI TENGAH

Saparuddin *

Abstract

Drinking Water represent the fundamental requirement which must be performed by every society. Until year 2000, the level of service of drinking water by government, in national a long way off from goals 80 % for the urban of and 60 % to the rural, Effort government have a lot of performing to prefare drinking water, but existing wtilize unable to go along way because do not get the good enough operation and conservancy, drinking water levying can go well if society become the especial characterization of wtilizing handling of wtilizing drinking water start from planning, development come up with the management with making organization handling and consumer deliberation of drinking water in the village.

Keywords: *Independence of drinking water countryside society*

Abstrak

Air minum merupakan kebutuhan pokok yang harus diadakan oleh setiap lapisan masyarakat. Sampai tahun 2000, tingkat pelayanan air minum oleh pemerintah, secara nasional masih jauh dari target 80 % untuk perkotaan dan 60 % untuk pedesaan, Usaha pemerintah telah banyak mengadakan sarana dan prasarana air minum, namun sarana yang ada tidak mampu bertahan lama karena tidak mendapat pemeliharaan dan pengoperasian yang cukup baik, Pengadaan air minum bisa berjalan lancar bila masyarakat menjadi pemeran utama penanganan sarana dan prasarana air minum mulai dari perencanaan, pembangunan sampai pada pengelolaan dengan membentuk badan penanganan air minum dan badan musyawarah pengguna air minum di desa.

Kata kunci: Kemandirian air minum masyarakat desa

1. Pendahuluan

Kebutuhan akan air minum semakin dirasakan seiring semakin majunya aktifitas manusia yang banyak membutuhkan air untuk keperluan hidup, sementara air yang tersedia dirasakan semakin berkurang, disamping disebabkan oleh sumber-sumber air yang ada banyak mengalami pengotoran sebagai akibat dari aktifitas manusia itu sendiri juga disebabkan oleh pengaruh perubahan iklim yang mengakibatkan sirkulasi air tidak sesuai perkiraan manusia sebelumnya.

Pengadaan air minum telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) sebagai usaha untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat, namun usaha ini belum maksimal hasilnya, karena masih sering dijumpai warga desa/kelurahan yang kesulitan untuk mendapatkan air minum.

Sampai dengan tahun 2000, tingkat pelayanan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sebagai instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan umum di bidang air minum, secara nasional baru mencapai 39 % penduduk di kawasan perkotaan dan 8 % penduduk di kawasan pedesaan, sedangkan target tingkat pelayanan yang diharapkan pada tahun tersebut adalah 80 % untuk perkotaan dan 60 % untuk pedesaan. Dengan demikian masih cukup banyak masyarakat di

* Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu

Indonesia yang belum mendapatkan pelayanan air minum.

Untuk mempercepat pencapaian tingkat pelayanan air minum, perlu digalakkan usaha partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai penyelenggara urusan publik. Salah satu usaha untuk mendukung upaya ini adalah mengembangkan konsep Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAM-BM) dengan prinsip dasar adanya peran masyarakat sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pemanfaatan.

Peran masyarakat dalam hal ini dicirikan dengan adanya bentuk lembaga masyarakat yang mandiri keberadaannya sangat diperlukan sehingga dimungkinkan terlaksananya penyelenggaraan (PAM-BM) yang mengutamakan pelayanan kepada para pengguna dapat dipertanggungjawabkan, dapat diterima, dan berkelanjutan serta pendanaannya bersumber dari iuran yang dikumpulkannya.

Kondisi topografi Sulawesi Tengah yang sebagian besar pegunungan dan perbukitan, sehingga penyebaran penduduk juga tidak merata seiring dengan lokasi-lokasi pemukiman yang banyak memilih lokasi pada daerah-daerah pendataran disamping juga dekat dengan sumber air, adanya perubahan iklim dan perubahan turunnya hujan tidak merata maka banyak sumber-sumber air tidak aktif lagi sebagaimana sebelumnya sehingga masyarakat yang sudah bermukim disuatu lokasi yang sewaktu-waktu kesulitan untuk memperoleh air, timbul masalah karena kurangnya cadangan air yang dapat dimanfaatkan, sementara cadangan air yang ada tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, karena terdapatnya masyarakat dengan mudah dan murah mendapatkan air sementara masyarakat lainnya kesulitan dan tingginya biaya untuk mendapatkan air minum

Usaha pemerintah telah banyak mengadakan sarana dan prasarana air minum untuk dimanfaatkan masyarakat

secara bersama-sama, namun sarana yang ada tidak mampu bertahan lama karena tidak mendapat pemeliharaan dan cara pengoperasian yang cukup baik, sehingga kerusakan kecil dapat berkembang menjadi kerusakan besar sampai tidak berfungsinya sarana dan prasarana yang ada.

Dari uraian tersebut di atas perlu dilakukan perintisan untuk mendapatkan gambaran jenis prasarana dan sarana air minum yang sesuai dan dapat ditempatkan di tengah-tengah masyarakat yang mampu melayani, mudah di jangkau, dan dapat dikelola oleh masyarakat pemakai itu sendiri baik pengoperasiannya, pemeliharaannya maupun pendanaannya.

2. Tinjauan Pustaka

Air yang ada di permukaan dan di dalam tanah (daratan) berasal dari hujan. Hujan adalah salah satu hasil dari proses peredaran air. Akibat jatuhnya hujan yang tidak merata dan keadaan geologis dari tanah yang berlainan, maka kandungan air dalam tanah dan air permukaan pada tiap tempat akan berlainan pula. Makin lebat keadaan hutan, makin banyak menyimpan air hujan. Hutan yang lebat akan melepaskan air secara berlahan-lahan dan teratur ke lapisan-lapisan tanah, danau-danau, sungai-sungai dan penguapan. (Surbakti, 1988)

Rochadi Didi, 2002 dalam Saparuddin, (2004) Permasalahan pengadaan air bersih di Desa selalu terjadi setiap tahun dengan intensitas yang bervariasi, demikian pula daerah yang dilanda kekeringan, disamping bervariasi ada juga setiap tahun terjadi rawan air bersih. Kecendrungan Desa rawan air minum semakin bertambah dengan semakin rusaknya lingkungan khususnya pada daerah tangkapan air. Permasalahan kerawanan air minum disamping diakibatkan kemarau panjang dapat juga disebabkan karena bencana alam dan atau bencana karena ulah manusia.

Selanjutnya Saparuddin (2004) Penyebab Permasalahan pengadaan

air minum di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Sumber air yang ada kering di musim kemarau.
- b. Instalasi air yang ada tidak berfungsi lagi.
- c. Air yang ada di sekitar pemukiman penduduk tidak memenuhi syarat kesehatan.
- d. Bak penampungan yang ada tidak mampu menampung persediaan air untuk musim kemarau.

Sebenarnya banyak sumber air yang ada di sekitar tempat tinggal masyarakat, namun Karena pengelolaannya memerlukan keahlian dan biaya yang cukup besar sehingga sumber-sumber air tidak dapat dimanfaatkan dengan baik (Daud A dan Rosna, 2001)

Untuk mempercepat pencapaian tingkat pelayanan air minum, perlu digalakkan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai penyelenggaraan urusan public. Salah satu kebijakan untuk mendukung upaya ini adalah mengembangkan konsep Penyediaan air minum Berbasis Masyarakat yang mandiri dengan prinsip dasar adanya peran masyarakat sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pemanfaatan. Peran masyarakat dalam hal ini dicirikan

dengan adanya bentuk lembaga masyarakat yang menangani masalah penanganan air minum di desa yang mengutamakan pelayanan kepada pengguna, transparan, dapat dipertanggung-jawabkan, dapat diterima, dan berkelanjutan (Anonim, 2004)

3. Metode Penelitian

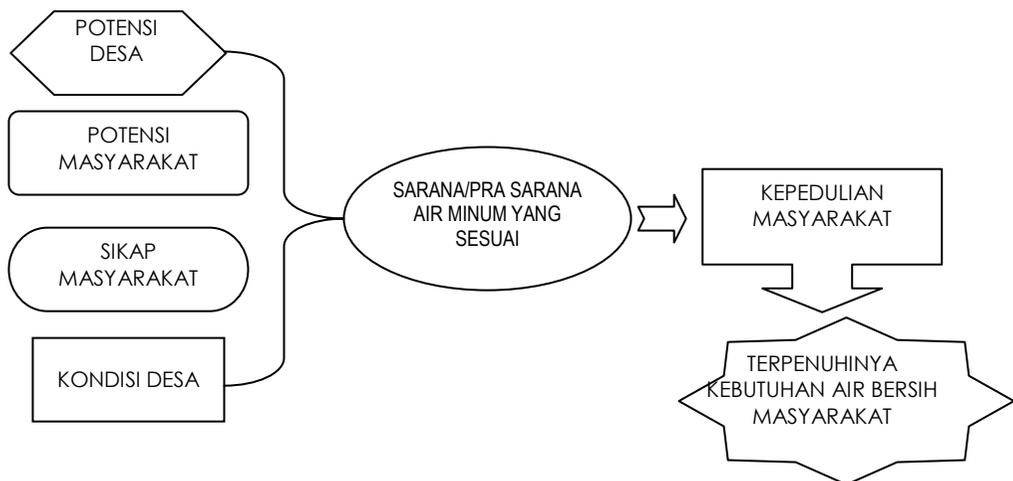
3.1 Kerangka fikir penelitian

Pencapaian kemandirian masyarakat untuk memperoleh air minum haruslah sarana dan prasarana air minum mendapat kepedulian dari masyarakat untuk mencapai kepedulian ini setidaknya ada empat variabel yang harus diperhatikan seperti pada gambar 1.

3.2 Desa rintisan

Berdasarkan petunjuk dan koordinasi dengan pihak Dinas Kimpraswil ditetapkan desa sebagai desa rintisan pada penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Desa yang pengadaan air minumnya tidak ditangani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
2. Desa yang pengadaan air minumnya diusahakan oleh masyarakat secara swadaya.



Gambar 1. Kerangka fikir penelitian

3. Desa yang pengembangan jaringan air minumnya sedang dilaksanakan dan mendapat bantuan dari pemerintah.
4. Desa yang telah mendapat pengadaan sarana air minum dari bantuan pemerintah dan saat ini masih berfungsi dengan baik
5. Desa yang pengadaan sarana air minumnya dari bantuan pemerintah dan saat ini kurang berfungsi karena kurangnya pemeliharaan.
6. Desa yang telah mendapat pengadaan air bersihnya tidak mencukupi dan pembagian airnya secara bergiliran.

Dari pertimbangan diatas maka ditetapkan desa rintisan seperti pada tabel 1. yang tersebar dalam Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah.

3.3 Teknik Pengumpulan dan analisa data

Teknik pengumpulan dan analisa data meliputi hal sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan identifikasi teknik pengumpulan data yang digunakan adalah.Wawancara kepada masyarakat di desa rintisan dan Observasi kondisi sumber air yang ada di desa rintisan.

- b. Analisis data yang digunakan deskriptif analitik

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Permasalahan yang terjadi di setiap desa

Adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan merupakan masalah yang perlu penanganan, harapan untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi segenap warga desa secara mandiri diperhadapkan pada kenyataan bahwa, masih terdapat warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan air minumnya walaupun pemerintah telah melakukan stimulan untuk menggairahkan keinginan masyarakat mengusahakan kebutuhan air minumnya sendiri, kenyataan ini telah banyak dibangun sarana dan prasarana air minum, namun tidak lama dinikmati oleh masyarakat manfaat fasilitas itu lalu kemudian tidak berfungsi karena rusak atau karena tidak dapat dioperasikan oleh warga desa.

Berikut ini dikemukakan daftar permasalahan yang terjadi disetiap desa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat seperti pada tabel 2.

Tabel : 1. Desa Rintisan dalam Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah.

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertimbangan
1	Limran	Palu Utara	Palu	2100	1 dan 2
2	Bale	Tawaeli	Donggala	1186	1 dan 3
3	Binangga	Parigi	Parimo	2078	1 dan 5
4	Dadakitan	Baolan	Toli-Toli	3607	1 dan 4
5	Kali	Biau	Buol	3517	1 dan 4
6	Tiwaa	Posos Pesisir	Poso	2036	1 dan 5
7	Sabolira Toba	Ampana	Touna	1700	1 dan 5
8	Kalolos	Kintom	Banggai	370	1 dan 5
9	Kanali	Totikum	Bangkep	397	1 dan 6
10	Gililana	Petasia	Morowali	920	1 dan 5

Sumber: Hasil Identifikasi (2004)

Tabel 2. Daftar Permasalahan yang Terjadi disetiap desa

No	Nama Desa	Permasalahan
1.	Limran Kota Palu	a. Masyarakat mengusahakan penanganan air minumnya secara sendiri-sendiri, dengan jalan melakukan pengeboran/ menancapkan pipa ke dalam tanah yang mempunyai sumber air kemudian dialirkan kerumah masing-masing dengan pipa paralon secara grafitasi

Tabel 2. (lanjutan)

No	Nama Desa	Permasalahan
1.	Limran Kota Palu	<ul style="list-style-type: none"> b. Desa Limran dibelah Sungai terdapat penyebrangan pipa yang panjangnya sekitar 50 m sering putus pada saat banjir c. Pengetahuan masyarakat tentang teknis pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum masih kurang
2.	Bale Kabupaten Donggala	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat hidran umum yang tidak berfungsi b. Masih terdapat sejumlah masyarakat yang jarak tempat tinggalnya dengan sumber air minum (Kran umum) lebih dari 500 m. c. Pengetahuan masyarakat tentang teknis pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum masih kurang
3.	Binangga Kabupaten Parigi Moutong	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Penjadapan air tidak maksimal b. Air yang masuk ke jaringan pipa keruh terutama pada musim hujan c. Hidran umum tidak berfungsi, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas dengan memotong pipa yang terdekat dengan rumahnya. d. Masih terdapat sejumlah masyarakat yang jarak tempat tinggalnya dengan sumber air minum (Kran umum) lebih dari 400 m. e. Aktifitas masyarakat yang mengurangi kualitas air f. Pengetahuan masyarakat tentang teknis pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum masih kurang
4.	Dadakitan Kabupaten Toli-Toli	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih terdapat sejumlah masyarakat yang jarak tempat tinggalnya dengan sumber air minum (Kran umum) lebih dari 500 m. b. Pengetahuan masyarakat tentang teknis pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum masih kurang c. Banyaknya aktifitas masyarakat disekitar daerah tangkapan mata air.
5.	Kali Kabupaten Buol	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih terdapat masyarakat yang jarak tempat tinggalnya dengan sumber air minum (Kran umum) lebih dari 500 m. b. Pengetahuan masyarakat tentang teknis pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum masih kurang. c. Banyaknya aktifitas masyarakat disekitar tangkapan mata air.
6.	Tiwaa Kabupaten Poso	<ul style="list-style-type: none"> a. Debit air yang keluar dari mata air yang disadap semakin berkurang b. Masih terdapat sejumlah masyarakat yang jarak tempat tinggalnya dengan sumber air minum (Kran umum) lebih dari 500 m. c. Pengetahuan masyarakat tentang teknis pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum masih kurang

Tabel 2 (lanjutan)

No	Nama Desa	Permasalahan
7	Sabolira Toba Kabupaten Tojo Una-Una	a. Debit air yang keluar dari mata air yang disadap semakin berkurang. b. Masih terdapat sejumlah masyarakat yang jarak tempat tinggalnya dengan sumber air minum (Kran umum) lebih dari 500 m. c. Pengetahuan masyarakat tentang teknis pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum masih kurang. d. Jaringan pipa hantar dan distribusi telah banyak yang mengalami kerusakan e. Debit air yang masuk ke jaringan pipa hantar relatif kecil, tidak mampu memenuhi kebutuhan air untuk warga desa
8	Kalolos Kabupaten Banggai	a. Kualitas Air tanah berbau dan keruh terutama pada musim hujan. b. Debit air yang keluar dari mata air yang disadap semakin berkurang c. Pengetahuan masyarakat tentang teknis pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum masih kurang. d. Jaringan pipa hantar dan distribusi tidak berfungsi lagi.
9	Kanali Kabupaten Banggai Kepulauan	a. Debit air yang keluar dari mata air yang disadap semakin berkurang. b. Kapasitas Pipa kecil c. Masih ditemukan warga desa yang jarak tempat tinggalnya dari sumber air sekitar 1.000 m d. Pengetahuan masyarakat tentang teknis pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum masih kurang e. Pembagian air secara giliran
10	Gililana Kabupaten Morowali	a. Jaringan pipa hantar dan distribusi telah mengalami kerusakan b. Kebanyakan warga kembali menggunakan air permukaan berupa air sungai untuk keperluan mandi, cuci, dan minum c. Masih terdapat masyarakat yang jarak antara sumber air dari tempat tinggalnya sampai 700 m. d. Pengetahuan masyarakat tentang teknis pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana air minum masih kurang.

Sumber: Hasil Identifikasi 2004

4.2 Potensi desa

Potensi desa dimaksudkan sumberdaya yang ada di desa yang dapat mendukung untuk mampu memenuhi kebutuhan air minumnya baik potensi alam dan lingkungan maupun sumberdaya manusia.

4.2.1 Sumber air

a. Air Permukaan

Sumber air berupa air permukaan di semua desa cukup potensial untuk memenuhi kebutuhan air bersih, namun rata-rata jarak antara sumber air dengan pemukiman penduduk antara 2

– 3 Km sehingga perlu perpipaan untuk dialirkan secara grafitasi sampai di pemukiman penduduk

b. Air Tanah

Topografi Desa Limpran yang miring terdapat potensi air tanah yang berada di ketinggian dapat dialirkan secara grafitasi ke pemukiman penduduk.

c. Mata Air

Sumber air berupa mata air di semua desa rintisan cukup potensial untuk memenuhi kebutuhan air minum, namun rata-rata jarak antara sumber air dengan pemukiman penduduk antara 3 – 5 Km sehingga perlu perpipaan untuk dialirkan secara grafitasi sampai di pemukiman penduduk

4.2.2 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Petani merupakan mata pencaharian masyarakat yang ada di desa rintisan kecuali masyarakat desa Kalolos di Kabupaten Banggai dan Desa Kanali di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan mata pencaharian sebagai nelayan sedangkan masyarakat desa Gililana disamping ada yang petani juga terdapat sejumlah nelayan, rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat antara pra sejahtera sampai sejahtera I.

4.2.3 Keterampilan Masyarakat

Keterampilan masyarakat untuk menangani kerusakan jaringan air yang rusak secara umum kurang, sehingga kerusakan yang ada sangat tergantung dari perhatian pemerintah kecuali Desa Kali di Kabupaten Buol dan Desa Dadakitan di Kabupaten Toli-toli permasalahan kerusakan jaringan air bersih ditangani oleh petugas air minum yang sumber dananya dihimpun dari uraian air bersih masyarakat.

4.2.4 Sosial budaya

Budaya gotongroyon di semua desa rintisan cukup baik, baik untuk kepentingan individu maupun untuk kepentingan umum, permasalahan yang bersifat fisik diselesaikan secara bersama. Disamping itu di semua desa rintisan terdapat sekolah dasar bahkan

ada desa terdapat SLTP artinya bila masyarakatnya diberi pelatihan akan mampu menangani pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minumnya.

4.3 Sikap masyarakat

Sikap masyarakat diartikan sambutan terhadap sarana dan prasarana yang akan di bangun di masing-masing desa. Hasil survey dan wawancara pada masyarakat di desa rintisan di peroleh data sebagai berikut:

4.3.1 Kesiapan Membiayai operasional sarana dan sarana air minum:

- a. Siap membantu membiayai sepanjang pengadaan air yang ada lebih baik dari sebelumnya.
- b. Siap membantu sebatas kemampuannya.
- c. Kalau bisa dibiayai dengan mengumpul hasil bumi masyarakat.

4.3.2 Pemanfaatan Sarana Air Minum yang ada

- a. Bila memungkinkan melakukan sambungan rumah.
- b. Cukup mengambil di hidran umum.
- c. Tergantung dari kondisi debit air dan kemampuan keuangan.

4.4. Bentuk Partisipasi / Keterlibatan Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum.

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, usaha pemerintah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan warga masyarakat diharapkan adanya partisipasi/keterlibatan warga, baik partisipasi secara individual maupun secara kelompok.

Dalam laporan ini dikemukakan bentuk partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air minumnya, baik setelah pemerintah melakukan pembangunan sarana dan prasarana air minum sebagai fasilitas, maupun fasilitas itu belum dibangun pemerintah. Bentuk partisipasi/kerelibatan masyarakat

diuraikan bentuk individual dan kelompok sebagai berikut:

4.4.1 Partisipasi/Keterlibatan Secara Individu

Bentuk partisipasi/keterlibatan masyarakat secara individu dalam penanganan pengadaan air minum di Desa Kali Kabupaten Buol dan Desa Dadakitan Kabupaten Toli-toli dilakukan dengan membayar iuran air minum sebesar sesuai tingkat kesejahteraan masyarakat, sedangkan di Desa Limran Kota Palu masyarakat mengusahakan air minumnya sendiri mulai dari pengeboran sampai jaringan perpipaannya, dan untuk desa lainnya usaha pengadaan air minum dilakukan sendiri-sendiri dengan mengambil air di sumbernya apa berupa air permukaan (sungai, mata air) membuat sumur gali dengan alat sederhana.

4.4.2 Partisipasi/Keterlibatan Secara Kelompok

Gotongroyong merupakan budaya masyarakat yang masih kental di Sulawesi Tengah, dalam penanganan permasalahan sarana yang ada di desa ditangani secara bersama-sama, termasuk penanganan sarana air bersi, namun masih diperlukan penggerak/pemimpin karena inisiatif individu sangat kurang. Seperti penggalian jaringan diperlukan arahan dari pihak tertentu yang mempunyai keahlian untuk itu.

4.5 Pembahasan

Pengadaan air minum merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh semua lapisan masyarakat apakah di pedesaan ataupun di perkotaan, nampaknya masyarakat di perkotaan menikmati pengadaan air minum yang lebih muda dan murah dibanding masyarakat yang tinggal di pedesaan walau kesejahteraan masyarakat perkotaan lebih baik dari pada masyarakat pedesaan.

Masyarakat yang ada di pedesaan pada waktu-waktu tertentu terutama pada musim kemarau mengusahakan air hampir sepanjang hari sehingga mengabaikan aktifitas

lainnya karena air yang ada disamping terbatas juga mempunyai jarak yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, sementara masyarakat di perkotaan pengadaan air minumnya cukup membayar sesuai banyaknya air yang dibutuhkan, air sudah didapat melalui pipa-pipa dan kran-kran umum yang tidak jauh dari tempat tinggalnya sehingga pengadaan airnya tidak sampai mengganggu kegiatan lainnya.

Sebenarnya potensi sumber-sumber air yang ada di desa cukup banyak, kualitas dan kuantitasnya memenuhi persyaratan yang ada, kalau diusahakan dapat didekatkan dengan pemukiman masyarakat yang akhirnya dapat meringankan beban masyarakat terutama dalam hal pengadaan air minum. Permasalahan yang dihadapi untuk pengadaan air minum di pedesaan meliputi sebagai berikut:

- a. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa rata-rata rendah.
- b. Hampir semua sarana dan prasarana air minum yang telah dibangun pemerintah di desa masa pakainya tidak sampai waktu yang ditentukan karena disamping pemahaman masyarakat untuk mengoperasikannya terbatas juga dana yang terhimpun dari masyarakat tidak mencukupi biaya operasional dan pemeliharaan yang tingkat kesejahtraannya terbatas.
- c. Keterampilan masyarakat untuk mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana air minum yang ada di desa kurang.
- d. Sarana dan prasarana air yang telah dibangun pemerintah di desa control dari pihak terkait terbatas.
- e. Jarak sumber air cukup jauh.
- f. Kualitas air yang ada di sekitar pemukiman masyarakat tidak memenuhi syarat air bersih dan kuantitasnya tidak mencukupi.
- g. Air tanah cukup jauh di bawah permukaan tanah.

Sarana dan prasarana yang ditemui tidak berfungsi lagi, hal ini terjadi karena rasa memiliki masyarakat sangat rendah disamping itu pengetahuan

masyarakat tentang pemanfaatan sarana yang terbatas.

Penanganan permasalahan pengadaaan air minum di desa dapat diatasi jika pemerintah mampu membuat stimulan yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan pembangunan sampai pada pengeoperasiannya, dengan jalan mengadakan sarana dan prasarana air minum didesa, dan membentuk badan penanganan air minum yang anggotanya dari masyarakat desa tersebut, yang tujuannya sarana dan prasarana air minum yang telah dibangun tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharannya diserahkan kepada badan penanganan air minum yang telah di bentuk dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan dan memelihara sarana air minum yang telah ada.
- b. Memperbaiki kerusakan yang terjadi.
- c. Menginpentarisir kebutuhan pengoperasian dan pepeliharaan.
- d. Menghimpun dana Pengeoperasian dan pemeliharaan.
- e. Melakukan pengembangan.
- f. Mengajukan usulan ke badan musyarah air bersih .

Anggota badan penanganan air minum yang telah di bentuk haruslah dibekali keterampilan, baik berupa keterampilan teknis penanganan rasana dan prasarana juga keterampilan administrasi dan pengelolaan keuangan.

Selain badan penanganan air minum juga diperlukan badan musawara air minum yang anggotanya terdiri dari:

- a. Pengelola air bersih (Ex. Off)
- b. Tokoh Masyarakat (dipilih oleh masyarakat)
- c. Kepala Desa (Ex. Off)
- d. Instansi pemerintah yang menangani air minum

Badan musyawara air minum ini setidaknya memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan pengelolaan air minum.

- b. Menetapkan besaran iuran air minum yang harus dibayar dari masyarakat pemakai air sebagai bentuk partisipasi.
- c. Mengevaluasi kinerja badan penanganan sarana dan prasarana air minum.
- d. Menanggapi keluhan masyarakat menyangkut penanganan air minum.

Mekanisme pendanaan untuk penyediaan air minum dimaksudkan cara menghimpun dana sampai pada penggunaan dana yang dikumpul untuk keperluan pengelolaan pengadaaan air minum sesuai kondisi masing-masing desa rintisan. Dalam perintisan penyediaan air minum menuju kemandirian air minum masyarakat desa di Sulawesi Tengah dikelompokkan menjadi sebagai berikut.

- a. Sumber dana (Pemerintah, Iuran masyarakat, Sumber lain).
- b. Mekanisme penghimpunan dana.
- c. Mekanisme prioritas pendanaan.
- d. Prioritas pendanaan.
- e. Alokasi pendanaan. (Bahan, Alat, Jasa).

Dengan terbentuknya badan penanganan air minum dan badan musyawara air minum maka Pengelolaan air bersih yang diharapkan dapat memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat dengan mudah dan terjangkau sesuai dengan rasa keadilan. Pengelolaan diharapkan secara profesional agar efektif dan efisien. Bila lembaga air minum yang telah dibentuk bisa berjalan baik maka kemandirian untuk mengusakan air minum pada masyarakat desa di Sulawesi Tengah dapat tercapai.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kemandirian air minum oleh masyarakat dapat tercapai bila masyarakat mempunyai andil mulai tahap perencanaan, pembangunan sampai pengoperasian sarana air minum.
2. Untuk menjamin keberadaan sarana dan prasarana air minum yang telah dibangun pelimpahan tanggung

jawab pengeoperasian dan pemeliharaan harus diserahkan kepada masyarakat.

3. Di setiap desa diperlukan badan penanganan sarana dan prasarana air minum sebagai badan yang bertanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum.

6. Daftar Pustaka

- Anonim, 2004 *Pedoman Umum Program Penyediaan Prasarana Air Bersih*, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta
- Anonim, 2004, *Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat*, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta
- Daud A dan Rosna, 2001, *Penyediaan Air Bersih (PAB)* Jurusan Kesehatan Lingkungan FKM UnhasMakassar.
- Saparuddin, 2004, *Identifikasi Desa Rawan Air di Sulawesi Tengah*, Smartek Vol 2 No. 3 Fakultas Teknik Universitas Tadulako Palu.
- Surbakti, 1988, *Air Minum Sehat*, Karya Anda Surabaya.
- Warsito. D, 1994, *Sumberdaya Air dan Lingkungan*, Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan, Bandung.